

BAB I

PENDAHULUAN

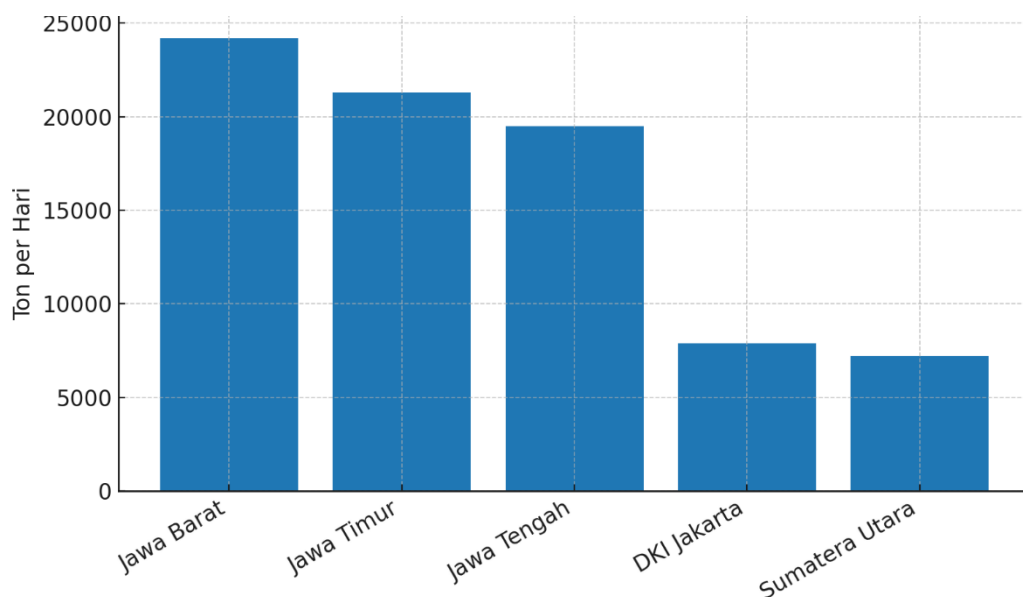
1.1 Latar Belakang

Isu pengelolaan sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan paling krusial di dunia modern. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan urbanisasi pesat telah mendorong bertambahnya volume sampah dalam skala yang sulit dikendalikan. Laporan *World Bank* (Kaza et al., 2018) menyebutkan bahwa pada tahun 2016 jumlah sampah global mencapai 2,01 miliar ton, dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,40 miliar ton pada tahun 2050 apabila tidak ada perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan. Ironisnya, lebih dari 90% sampah di negara berkembang masih dikelola dengan cara tradisional berupa penimbunan di TPA terbuka, yang berdampak pada pencemaran tanah, air, dan udara. Kondisi ini menegaskan bahwa masalah sampah tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut dimensi sosial, ekonomi, dan tata kelola kebijakan.

Di Indonesia, permasalahan serupa semakin kompleks. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, 2024, timbunan sampah nasional pada tahun 2023 mencapai 19,56 juta ton per tahun, meningkat tajam pada 2024 menjadi 34,21 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 13,24% sampah yang berhasil dikurangi, sementara 40,26% tidak terkelola. Ketimpangan antara volume timbunan dengan kapasitas pengolahan mengindikasikan lemahnya implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di lapangan. Padahal, kerangka hukum telah diatur melalui Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan paradigma pengelolaan berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R), serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021. Artinya, terdapat kesenjangan nyata antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementasi yang masih jauh dari optimal.

Permasalahan persampahan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu lingkungan yang krusial. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi menghasilkan timbunan sampah dalam jumlah besar yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2022 mencatat bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 36 juta ton sampah per tahun, dengan mayoritas bersumber dari kawasan perkotaan. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dikelola sesuai target kebijakan nasional dengan kenyataan di lapangan.

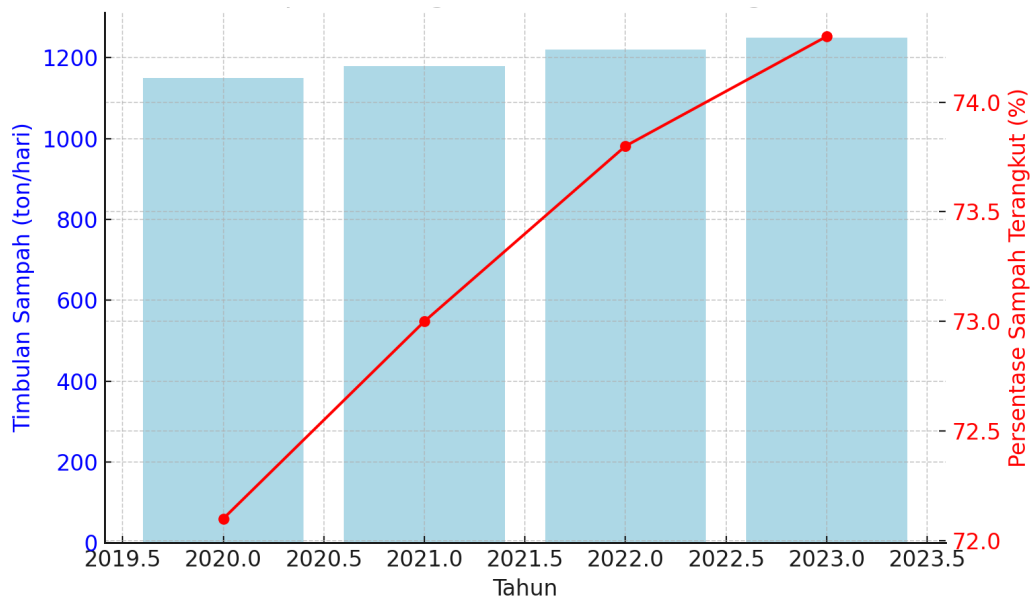


Gambar 1.1 Grafik Timbunan Sampah Nasional Berdasarkan Provinsi

Sumber : SIPSN, 2024

Gambar 1 menunjukkan data timbulan sampah nasional berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Terlihat bahwa Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar dengan timbulan mencapai 24.200 ton per hari, disusul Jawa Timur sebesar 21.300 ton per hari, dan Jawa Tengah dengan 19.500 ton per hari. Posisi berikutnya ditempati oleh DKI Jakarta dan Sumatera Utara, masing-masing dengan 7.900 ton per hari dan 7.200 ton per hari (SIPSN, 2024). Besarnya kontribusi dari tiga provinsi di Pulau Jawa ini tidak dapat dilepaskan dari faktor kepadatan penduduk, urbanisasi, dan tingginya aktivitas industri maupun perdagangan yang berpusat di wilayah tersebut.

Fenomena ini menegaskan bahwa permasalahan persampahan di Indonesia bersifat terpusat pada kawasan urban di Pulau Jawa, sehingga kebijakan pengelolaan bank sampah harus memperhatikan skala lokal dan regional sekaligus. Dengan kata lain, kebijakan nasional tidak dapat hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga memerlukan instrumen pengelolaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan komunitas di tingkat kota serta desa. Hal ini menjadi penting karena jika tidak segera ditangani, akumulasi timbulan sampah berpotensi menimbulkan krisis lingkungan, kesehatan, dan sosial yang semakin kompleks.



Gambar 1.2 Grafik Timbulan dan Sampah Terangkut di Kota Semarang
Sumber : DLH, 2020-2023

Gambar 2 memperlihatkan tren timbulan sampah di Kota Semarang selama periode 2020–2023. Data menunjukkan adanya kenaikan timbulan sampah dari 1.150 ton per hari pada tahun 2020 menjadi 1.250 ton per hari pada tahun 2023. Sementara itu, persentase sampah yang berhasil terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang juga mengalami peningkatan, dari 72,1% pada 2020 menjadi 74,3% pada 2023 (DLH Kota Semarang, 2023).

Meskipun terdapat perbaikan dalam kinerja pengangkutan, fakta bahwa sekitar seperempat sampah masih belum tertangani dengan baik menimbulkan persoalan serius. Sampah yang tidak terangkut berpotensi menumpuk di TPS, menimbulkan pencemaran lingkungan, dan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pengelolaan dan kapasitas pengangkutan yang tersedia.



Gambar 1.3 Kondisi Penumpukan Sampah di TPA Jatibarang

Sumber : Detik.com/jateng

Situasi ini juga dapat dilihat pada TPA Jatibarang di Semarang, yang saat ini menampung sekitar 800–950 ton sampah setiap harinya. Akibatnya, timbunan sampah kian menggunung dan daya tampung TPA diperkirakan hanya mampu bertahan beberapa tahun ke depan jika tidak segera ditangani dengan serius. Penumpukan ini mencerminkan belum optimalnya sistem pengurangan dan pengolahan sampah dari hulu, sehingga solusi berbasis masyarakat seperti bank sampah menjadi semakin penting untuk mengurangi beban TPA.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Semarang mengadopsi kerangka kebijakan pengelolaan sampah berbasis prinsip ekonomi sirkular, sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012. Kebijakan nasional ini menekankan pengurangan (*reduce*), penggunaan ulang (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) sebagai pilar utama. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Semarang kemudian menetapkan

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 yang mewajibkan pemilahan sampah di sumber, serta melengkapi kebijakan tersebut dengan Peraturan Wali Kota No. 4 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah 2023–2042. Rencana Induk ini menargetkan penerapan “*zero waste to landfill*” pada tahun 2040, dengan memperkuat program 3R di tingkat komunitas dan mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat.

Dalam perspektif tata kelola lingkungan, sampah bukan hanya menjadi persoalan teknis pengangkutan dan pembuangan, melainkan juga terkait erat dengan aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, serta kebijakan publik. Sejumlah literatur menekankan bahwa masalah sampah merupakan konsekuensi dari model pembangunan perkotaan yang berorientasi pada konsumsi tinggi dan minim pengendalian pada sumbernya (UNEP, 2021). Oleh karena itu, penanganan sampah membutuhkan pendekatan multidimensi dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta secara sinergis. Salah satu pendekatan yang dipandang efektif di Indonesia adalah penerapan program bank sampah.

Salah satu instrumen terdepan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat adalah pendirian Bank Sampah. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021, bank sampah berfungsi sebagai pusat pengumpulan sampah anorganik terpilah—plastik, kertas, logam, dan kaca—yang dihitung dalam satuan berat untuk kemudian dikonversi menjadi saldo tabungan bagi warga. Mekanisme “menabung sampah” ini memadukan insentif ekonomi dengan pendidikan lingkungan: ketika warga menyerahkan sampah, mereka memperoleh poin atau rupiah yang dapat dicairkan atau digunakan untuk membeli

kebutuhan pokok, membayar iuran RT, bahkan menambah modal usaha mikro. Dengan demikian, bank sampah tidak hanya mengalihkan volume sampah dari alur pembuangan akhir, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya memilah limbah sejak di rumah.

Pertumbuhan jumlah bank sampah di Kota Semarang cukup pesat. Pada akhir 2023 tercatat ada 497 unit bank sampah aktif, kemudian meningkat menjadi 664 unit pada pertengahan 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya percepatan pembentukan unit bank sampah di berbagai kecamatan, termasuk Pedurungan. Berikut adalah daftar bank sampah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pedurungan :

Tabel 1.1 Daftar Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan

Kelurahan	Jumlah Bank Sampah
Penggaron Kidul	1
Muktiharjo Kidul	18
Pedurungan Lor	10
Pedurungan Tengah	36
Tlogosari Kulon	2
Tlogosari Wetan	9
Kalicari	4
Tlogomulyo	4
Palebon	4
Plamongansari	1
Gemah	5

Pedurungan Kidul	3
Total	97

Tabel tersebut menunjukkan bahwa di Kecamatan Pedurungan terdapat total 97 bank sampah yang tersebar di 12 kelurahan, dengan distribusi yang belum merata. Kelurahan Pedurungan Tengah menjadi yang terbanyak dengan 36 bank sampah, diikuti Muktiharjo Kidul dengan 18 bank sampah, Pedurungan Lor dengan 10 bank sampah, serta Tlogosari Wetan dengan 9 bank sampah. Sementara itu, kelurahan lain berada pada kategori jumlah moderat, seperti Gemah dengan 5 bank sampah, Pedurungan Kidul dengan 3 bank sampah, serta Kalicari, Tlogomulyo, dan Palebon masing-masing memiliki 4 bank sampah. Adapun kelurahan dengan jumlah paling sedikit adalah Penggaron Kidul dan Plamongansari yang masing-masing hanya memiliki 1 bank sampah. Kondisi ini menunjukkan adanya dominasi pengelolaan bank sampah berbasis masyarakat di Pedurungan Tengah, tetapi juga menandakan perlunya upaya pengembangan di kelurahan dengan jumlah bank sampah yang masih minim agar distribusi layanan lebih merata di seluruh wilayah Kecamatan Pedurungan.

Meskipun jumlah bank sampah di Kota Semarang, termasuk di Kecamatan Pedurungan, mengalami peningkatan yang signifikan, masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Sebagian besar unit bank sampah menghadapi kendala dalam hal keberlanjutan operasional, kapasitas manajerial, dan partisipasi masyarakat yang fluktuatif. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yakni memberikan kontribusi pengetahuan baru dengan

menelaah dinamika implementasi bank sampah pada tingkat lokal secara lebih mendalam, sehingga dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Indonesia. Dari sisi urgensi sosial, penelitian ini penting karena persoalan sampah di Kota Semarang bukan hanya menyangkut aspek lingkungan, melainkan juga kesehatan publik, kualitas hidup warga, serta citra tata kelola kota. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan menurut kerangka kebijakan dengan apa yang senyatanya terjadi di masyarakat, serta menghadirkan solusi praktis yang relevan dan kontekstual bagi keberlanjutan pengelolaan bank sampah di tingkat lokal.

Meskipun jumlah bank sampah di Kecamatan Pedurungan terus bertambah dan hampir menjangkau seluruh kelurahan, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius. Volume sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat tetap tinggi, dan sebagian besar masih berakhir di TPA Jatibarang tanpa melalui proses pemilahan yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan bank sampah belum sepenuhnya mampu menekan laju pertambahan sampah dari sumbernya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana implementasi kebijakan bank sampah benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya, yaitu mengurangi timbulan sampah di tingkat rumah tangga melalui partisipasi aktif masyarakat.

Selain itu, fungsi bank sampah di Kota Semarang, termasuk Kecamatan Pedurungan, cenderung masih terbatas pada pengumpulan, pemilahan, dan penjualan kembali sampah anorganik ke pengepul. Inovasi produk daur ulang

bernilai tambah belum berkembang optimal, padahal aspek ini penting untuk memperkuat peran bank sampah sebagai pusat inovasi dan penggerak ekonomi sirkular di tingkat lokal. Produk turunan seperti kerajinan tangan, paving block dari plastik, maupun barang kreatif berbahan sampah masih minim, bahkan sering tidak diminati pasar karena desain monoton, kualitas rendah, dan harga tidak kompetitif.

Gambar 1.4 Hasil Olahan Bank Sampah



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Foto tersebut memperlihatkan sebuah kerajinan tangan berupa wadah yang dibuat dari kemasan plastik bekas minuman dan makanan ringan. Produk ini merupakan salah satu bentuk upaya pemanfaatan kembali sampah anorganik melalui kreativitas masyarakat atau bank sampah. Namun, meskipun mampu menunjukkan nilai fungsional sekaligus estetika, produk semacam ini umumnya masih memiliki keterbatasan pada variasi desain, daya tahan, dan nilai jual di pasaran. Hal ini selaras dengan kondisi di lapangan, di mana inovasi produk daur

ulang dari bank sampah di Kota Semarang, termasuk Kecamatan Pedurungan, masih terbatas pada kerajinan sederhana yang tidak selalu mampu menarik minat konsumen secara luas.

Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara rancangan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan, sebagaimana dijelaskan Grindle bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaannya (*context of implementation*).

Lebih jauh, kesenjangan juga terlihat antara target pengurangan sampah yang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah maupun nasional dengan capaian nyata di lapangan. Pemerintah Kota Semarang melalui Rencana Induk Pengelolaan Sampah 2023–2042 menargetkan pengurangan sampah secara progresif menuju konsep zero waste to landfill pada 2040. Namun, capaian pengurangan masih relatif rendah dibandingkan dengan timbulan yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya dukungan masyarakat, serta lemahnya koordinasi antaraktor. Dengan demikian, implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Pedurungan belum optimal, sehingga memerlukan penguatan dari sisi sosialisasi, dukungan pendanaan, pendampingan pemerintah, serta inovasi produk agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara berkelanjutan. Dengan melihat dinamika tersebut, penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan”** menjadi penting dilakukan. Kajian ini tidak hanya relevan secara akademis untuk memperkaya literatur tentang tata kelola lingkungan berbasis

masyarakat, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam memberikan masukan bagi pembuat kebijakan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kekuatan dan kelemahan implementasi yang ada saat ini, serta menawarkan rekomendasi yang dapat memperkuat peran bank sampah sebagai instrumen pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Semarang.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Keberadaan bank sampah belum mampu menurunkan volume sampah di Kecamatan Pedurungan
2. Kesenjangan antara Target Pengurangan Sampah dan Realisasi Lapangan
3. Minimnya inovasi produk daur ulang

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka dapat merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, diantaranya :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah dilakukan di Kecamatan Pedurungan?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Pedurungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang disajikan dalam latar belakang masalah, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Pedurungan.

2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Pedurungan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Pada penelitian ini bertujuan agar pembaca diharapkan untuk dapat menambah *insight* baru baik pengetahuan maupun wawasan serta diharapkan pembaca agar memahami teori-teori mengenai pengelolaan bank sampah, penelitian ini juga nantinya dapat digunakan sebagai wadah dan media guna mengembangkan pengetahuan serta menjadi bahan literatur guna menambah rencana baru bagi penyumbang akademis peneliti serta penelitian ini juga kedepannya dapat digunakan untuk bahan perbandingan penelitian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Pada penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan juga instansi terkait :

1. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis agar penulis bisa mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya, menambah *insight* dan pengalaman, dan menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang sama dengan judul penelitian yang diambil.

2. Bagi Pembaca

Manfaat praktis untuk pembaca adalah agar bertambahnya ilmu mengenai topik yang dikaji dalam penelitian ini, & dapat digunakan sebagai bahan referensi apabila pembaca ingin meneliti topik ini lebih lanjut.

3. Bagi Instansi Terkait

Manfaat praktis bagi instansi terkait adalah diharapkan melalui penelitian ini instansi terkait dapat mengambil informasi yang bermanfaat agar nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Melalui penelitian yang sudah diteliti bermaksud sebagai upaya untuk membandingkan dan mencari referensi lain untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa adanya orisinalitas atau pembaharuan penelitian. Penelitian terdahulu yang dikaji memfokuskan pada penelitian yang memiliki kaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah. Berikut tabel penelitian terdahulu :

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. <i>JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia</i> , 2(2), 92-101. (Hastuti et al., 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan mengetahui faktor	Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III	Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan telah

		penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan			memenuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun dalam implementasinya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan kebijakan, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam hasil pelaksanaan kebijakan.
2.	Wachid, A., & Caesar, D. L. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus. <i>J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat</i> , 6(2), 173-183. (Wachid & Caesar, 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.	Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980).	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Kurangnya kampanye kesadaran masyarakat yang ekstensif oleh pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya pengetahuan tentang kebijakan pengelolaan sampah di berbagai segmen masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus menghadapi tantangan karena

					keterbatasan anggaran dan terbatasnya peralatan pengolahan sampah. Selain itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi tampaknya lebih bersifat formalitas, karena kurangnya tindak lanjut rutin terhadap penilaian tersebut setiap tahunnya.
3.	Edyanto, E., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. <i>JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)</i> , 5(4). (Edyanto et al., 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan otonomi khusus bagi Papua	Teori dari penelitian ini mengacu pada Edward III (1980).	Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.	Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa ada empat (4) faktor yang saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan otonomi khusus Papua di kabupaten Biak Numfor, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur organisasi atau birokrasi.

4.	Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. <i>Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia</i> , 20(1), 21-26. (Yudianto et al., 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan mendeskripsikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Blora	Teori dari penelitian ini mengacu pada Edward III (1980).	Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Blora dapat berjalan baik yang berpedoman pada dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, yang dilaksanakan mulai dari pengutipan retribusi, sumber timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan (TPS) pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir (TPS). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan Indeks kepuasan mencapai angka 86,858 dengan grade B
----	--	--	---	---	---

					atau memuaskan.
5.	Amir, M., & Anto, R. P. (2018). A Study Policy Implementation of Waste Management in Konawe Regency, Indonesia. <i>Journal of Sustainable Development</i> , 11(1), 90-100. (Amir & Anto, 2018)	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe.	Teori dari penelitian ini mengacu pada Edward III (1980).	Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe. Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe yaitu dari aspek fasilitas yang masih kurang, kondisi wilayah kerja yang sangat luas, kesadaran masyarakat yang masih kurang, partisipasi masyarakat yang kurang.

6.	Fatmawati, F., Mustari, N., Haerana, H., Niswaty, R., & Abdillah, A. (2022). Waste bank policy implementation through collaborative approach: comparative study—Makassar and Bantaeng, Indonesia. <i>Sustainability</i> , 14(13), 7974. (Fatmawati et al., 2022)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program inovasi bank sampah dalam kebijakan nasional.	Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance .	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-eksploratif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kota Makassar dan Kabupaten Bantaeng belum berjalan maksimal terutama pada aspek komunikasi antar pemangku kepentingan, termasuk partisipasi masyarakat.
7.	Verawati, S., & Tuti, R. W. D. (2020). Policy Implementation of Solid Waste Management in South Jakarta. <i>Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)</i> , 10(2), 118-126. (Verawati & Tuti, 2020)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut.	Penelitian ini menggunakan teori Edward III.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif.	Hasil dari penelitian ini adalah, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta Selatan belum terlalu baik.
8.	Inopianti, N., Munibah, K., & Purwanto, M. Y. J. (2021). Implementation of sustainable food agricultural land protection policy in Sukabumi city, West Java, Indonesia. <i>International Journal of Business, Economics, and Social Development</i> , 2(3), 107-112. (Inopianti et al., 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan LP2B di tingkat implementasi kebijakan LP2B di Kota Sukabumi.	Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Charles O. Jones.	Peneliti menggunakan metode deskriptif melalui pengumpulan data dengan wawancara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kesiapan lahan, pada awal tahun 2021 Kota Sukabumi telah siap sekitar 10,024% dari total lahan yang direncanakan. Untuk pelaksanaan program insentif LP2B

					mayoritas petani belum merasakan program insentif tersebut.
9.	Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya (Bank Sampah (Waste Banks) as an alternative of community-based waste management strategy in Tasikmalaya). <i>Jurnal manusia dan lingkungan</i> , 23(1), 136-141.	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan bank sampah berbasis 4R di Kampung Karangresik serta manfaatnya bagi masyarakat dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, sekaligus mengkaji peran pemberdayaan warga dan dukungan kemitraan stakeholder.	Penelitian ini menggunakan teori Edward III.	Peneliti menggunakan metode deskriptif melalui pengumpulan data dengan wawancara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Pucuk Resik mampu mengurangi timbulan sampah, meningkatkan manfaat ekonomi bagi warga, serta memperkuat partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui penerapan prinsip 4R.

1.5.2 Administrasi Publik dan Perkembangannya

Administrasi publik ialah sebuah pecahan dari konsep administrasi umum, yang dimana administrasi publik itu sendiri merupakan ilmu yang sangat luas untuk dipelajari. Dalam hal ini, administrasi publik mempelajari ilmu dari lembaga bagian terkecil hingga lembaga yang besar. Administrasi publik juga sebuah ilmu yang didalamnya terdapat pelajaran mengenai cara pemerintah memperoleh hal yang diinginkan masyarakat (Dimock & Hurd, 1992). Hal tersebut diartikan bahwa

administrasi publik tidak hanya membahas apa yang masyarakat inginkan, tetapi juga bagaimana cara pemerintah untuk menggabungkan dan memperoleh apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikutnya, administrasi publik juga merupakan turunan dari administrasi dan politik (Thoha, 2017), yang berarti administrasi publik juga berkaitan dengan lingkup politik yang dimana administrasi publik diselenggarakan oleh negara/pemerintah. Lalu, administrasi publik juga membahas terkait dengan MSDM & dengan lingkup publik yang berguna untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan (Waldo et al., 1971). Administrasi publik juga diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih (kelompok) guna membangun kerjasama untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan, hal yang serupa juga disampaikan oleh (Tjokroamidjojo, 1978), yakni administrasi publik merupakan ilmu yang menjelaskan terkait dengan beberapa individu (kelompok) yang membangun kerjasama untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Terakhir, administrasi publik dikatakan bahwa ilmu yang mencakup semua proses dimulai dari penentuan sampai norma-norma yang memiliki sifat keseluruhan (Bunyamin, 1991).

Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan terkait dengan konsep administrasi publik, yakni sebuah ilmu yang mempelajari terkait dengan serangkaian kegiatan yang dibangun dalam kerjasama beberapa individu (kelompok) untuk mencapai tujuan tertentu seperti menyelesaikan tugas pemerintah untuk mengatasi apa yang sedang dibutuhkan dan dipentingkan oleh masyarakat baik secara efektif dan juga secara efisien.

Administrasi itu sendiri dapat dilihat dari perspektif etimologi yang berasal dari dua kata larin, yakni “*ad*” dan “*ministrate*” yang memiliki arti memenuhi / melayani, berikutnya definisi dari adminitrasi publik itu sendiri adalah sebuah bentuk tindakan/kegiatan yang dilakukan oleh beberapa individu atau lebih dalam linkup kerja publik, dalam lingkup tersebut terdapat 3 (tiga) lingkup, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Administrasi publik itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan guna menciptakan barang / jasa yang memiliki manfaat guna memenuhi kebutuhan para konsumen. Disamping itu, paradigma sendiri merupakan konsep yang menguraikan terkiat dengan suatu hal yang dipakai oleh para ahli untuk diterapkan dalam menguraikan perkembangan berbagai macam ilmu / perspektif ilmu pengetahuan yang dimana hal ini mempunyai tujuan guna menganalisis suatu peristiwa yang tengah ramai berkembang di kalangan masyarakat. Berikut ada 6 (enam) paradigma administrasi publik, diantaranya :

Paradigma Pertama (1900-1926), paradigma ini sering dikenal dengan nama Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi / teori klasik. Paradigma pertama ini menjelaskan terkiat dengan kewajiban politik yang mesti fokus terhadap kebijakan yang sebanding dengan apa yang dingginkan oleh masyarakat sedangkan administrasi lah yang akan menjalankan pengawasan terhadap proses implementasi kebijakannya. Pemerintah tergolong menjadi 3 (tiga) bagian, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikati. Legislatif sendiri fokus dan memiliki tujuan untuk mencurahkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, lalu untuk eksekutif sendiri merupakan badan yang menjalani keinginan tersebut, dan yudikatif

merupakan badan yang memiliki tugas untuk membantu legislatif dalam merancang dan membentuk suatu kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga, hal ini dapat mencapai tujuan terkait dengan rancangan kebijakan. hal tersebut disebabkan oleh penggolongan yang dibuat antara administrasi dan politik.

Paradigma Kedua (1927-1937), berikutnya ada paradigma yang kedua, paradigma ini lebih dikenal dengan nama paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Konsep tersebut dicetuskan oleh beberapa ahli, yakni Willoughby, Gullick, dan Urwick selaku fokus dari studi administrasi publik. Berikut merupakan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Prinsip-Prinsip Administrasi, yakni POSDCRB. Pada paradigma kedua ini pastinya memiliki perbedaan dari paradigma sebelumnya, perbedaan tersebut terdapat pada fokus dari administrasi publik, dimana pada paradigma yang kedua ini fokus yang dijelaskan adalah terkait dengan prinsip-prinsip dari manajemen.

Paradigma Ketiga (1950-1970), Paradigma ketiga ini dikenal dengan sebutan Administrasi Negara sebagai ilmu politik, seorang ahli bernama Herbert Simon melontarkan sebuah kritik yang pedas terkait dengan perubahan dari prinsip administrasi, yang menyebabkan prinsip tersebut tidak universal. Pada paradigma ini menjadikan administrasi publik selaku sebuah ilmu politik yang memiliki fokus pada birokrasi pemerintah & sifat yang abstrak karena prinsip tersebut memiliki banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, pada akhirnya administrasi ini mengalami konfrontasi jati karena menganggap bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang memiliki pengaruh besar di studi administrasi publik ini. krisis identitas

karena menganggap ilmu politik merupakan ilmu yang dominan dalam studi administrasi publik.

Paradigma Keempat (1956-1970), Paradigma ini dikenal dengan penjelasannya yang menjelaskan bahwa Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Karena sebelumnya ada paradigma yang menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip, maka pada paradigma yang ke-4 ini fokus untuk mengembangkan prinsip-prinsip tersebut. Paradigma ini fokus pada beberapa ilmu, yakni management analysis , pengimplementasian modern technology (metode kuantitatif, analisis sistem, riset dan lain-lain), dan perilaku organisasi. Paradigma yang ke-4 ini memiliki perkembangan dan terbagi menjadi 2 (dua) arah, yakni ilmu administrasi itu sendiri (murni) yang diperkuat dengan dua arah yaitu orientasi dalam kebijakan publik dan psikologi sosial.

Paradigma Kelima (1970-Sekarang), Paradigma yang kelima ini menjelaskan terkait dengan Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara. Lokus dan fokus dari paradigma yang ke-lima ini sudah banyak dibahas. Pada fokus paradigma kelima ini adalah terkait dengan beberapa teori baik dalam organisasi maupun teori manajemen, & kebijakan publik. Selanjutnya, untuk lokusnya itu sendiri paradigma kelima ada pada masalah masalah publik dan juga kepentingan-kepentingan publik.

Paradigma Keenam (1990-Sekarang), pada paradigma ini biasanya dikenal dengan sebutan Paradigma Governance, dimana paradigma ini merupakan paradigma yang terbaru, paradigma ini baru karena baru diterapkan pada tahun 1990 hingga pada zaman sekarang. Paradigma ini juga dapat dikatakan baru karena

terdapat pada proses perkembangan ilmu administrasi publiknya yang sebelumnya telah dibahas. Kesimpulan dari konsep ini adalah untuk mengubah kinerja pegawai dalam sector publik, perubahan tersebut dari sektor privat/bisnis ke sektor publik itu sendiri. Perubahan dari government ke governance mencirikan bahwa governance memakai gabungan dari 3 (tiga) elemen, yakni pemerintah, sector privat/ swasta, dan juga masyarakat dan arah perkembangan paradigma keenam ini bertujuan agar dapat mencapai good governance.

Pada penelitian ini termasuk kedalam paradigma ke-6 (enam) : Governance karena paradigma governance menekankan bahwa penyelesaian masalah kompleks seperti pengelolaan bank sampah memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Dalam hal ini, implementasi kebijakan bank sampah membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah Kecamatan Pedurungan, lembaga-lembaga swasta yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah, dan partisipasi aktif masyarakat setempat.

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik, adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Lembaga yang bertugas menegakkan sanksi akan menjatuhkan sanksi secara terbuka dan sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Hasilnya, kebijakan publik dan undang-undang ini dapat dibandingkan. Bukan hanya hukumnya saja, kita juga perlu memahaminya secara utuh. Apabila diputuskan bahwa suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama perlu diatur, maka kebijakan publik harus dibuat dan disetujui oleh pejabat yang ditunjuk.

Kebijakan publik dapat didefinisikan dengan berbagai cara oleh para sarjana dan pakar yang berbeda. Easton, misalnya, mengkarakterisasi kebijakan publik sebagai distribusi nilai yang otoritatif ke seluruh masyarakat atau alokasi nilai yang bersifat wajib kepada seluruh anggota masyarakat. Demikian pula, Laswell dan Kaplan menggambarkan sebagai program terencana yang mencakup tujuan, nilai, dan praktik, atau strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan dan nilai tertentu melalui praktik yang ditargetkan. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mencakup kondisi awal dan konsekuensi yang dapat diperkirakan.

Penting untuk membedakan kebijakan publik dari bentuk kebijakan lain, seperti kebijakan swasta, karena kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor non-pemerintah. Menurut Robert Eyestone seperti dikutip Leo Agustino, kebijakan publik berkisar pada hubungan antara entitas pemerintah dan lingkungannya. Namun, beberapa orang mungkin menganggap definisi ini terlalu luas untuk dipahami sepenuhnya, mengingat luasnya cakupan kebijakan publik.

Woll (2019), "Kebijakan publik terdiri dari serangkaian kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat". Anderson (2009, dikutip dalam Islamy, 2009: 17), *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"*. Pada dasarnya, ini melibatkan serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.

Secara ringkas, berdasarkan penafsiran para ahli tersebut, kebijakan publik dapat diartikan sebagai rangkaian keputusan kebijakan yang diambil oleh individu atau kelompok dengan tujuan mencapai tujuan masyarakat tertentu. Keputusan-keputusan ini dirumuskan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan dilaksanakan melalui tindakan dan praktik yang terencana. Kebijakan publik memainkan peran penting dalam membentuk arah dan fungsi pemerintah serta interaksinya dengan masyarakat luas.

1.5.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan, sebagaimana diuraikan oleh (Nugroho, 2014), pada hakikatnya adalah upaya suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Namun, dalam praktiknya, proses implementasi kebijakan sangatlah rumit, seringkali ditandai dengan kompleksitas politik dan dipengaruhi oleh intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2014: 138).

Implementasi kebijakan menurut Pandji Santosa dalam buku "*Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*" merupakan aktivitas dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan sesuatu sebuah kebijakan dengan efektif. Menurut ahli lainnya yaitu Jones dalam (Sutojo, 2015) mengemukakan implementasi sebagai dari sebuah proses dalam mendapatkan sumber daya tambahan yang dapat dihitung apa saja yang mampu dikerjakan.

Menurut Grindle (dalam (Hidayatulloh & Mulyadi, 2015) mengemukakan bahwa implementasi adalah sebuah proses dari tindakan umum administrasi yang mampu diteliti pada tingkatan program tertentu. Menurut Merilee S. Grindle dalam

(Wibawa, 1994) untuk mencapai keberhasilan Implementasi Kebijakan yaitu dipengaruhi oleh variable yang besar sebanyak dua yaitu isi kebijakan serta lingkungan implementasi.

- Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Mencakup :

- a. *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)

Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor

- c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada pon ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki

skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin

d. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

e. *Program Implementer* (Pelaksana Program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

f. *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

- Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Mencakup :

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-
Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

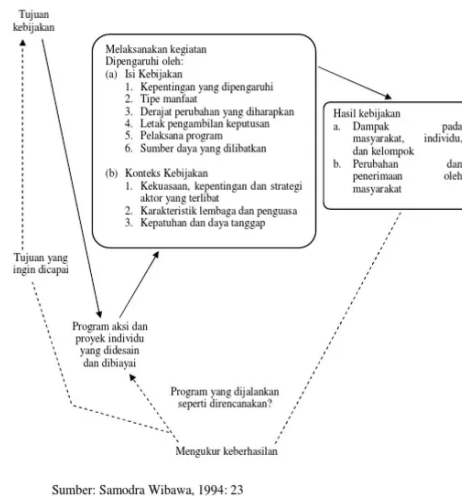
Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.



kegiatan dari administrasi yang membentuk pada masukan kebijakan kedalam output serta dampak dari kebijakan tersebut.

Menurut Edwards III dalam Herabudin (2022:128) implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dengan empat variable diantaranya yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah faktor yang penting dalam implementasi kebijakan, komunikasi sendiri merupakan hal yang sangat didalam penentuan mengenai keberhasilan didalam capaian sebuah tujuan didalam implementasi kebijakan (Agustino, 2014). Dengan implementasi sebuah kebijakan publik ini yang kompleks dan dituntutnya sebuah kerjasama dari berbagai pihak maka diperlukannya faktor yang penting yaitu komunikasi untuk mencapai tujuan bersama serta pemahaman yang sama satu sama lain.

b. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan tersebut untuk dapat terlaksana dengan baik serta tepat dan efektif maka sangat dibutuhkannya sebuah sumber daya yang baik pula. Sumber daya merupakan faktor yang penting juga didalam implementasi kebijakan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari ahli yaitu Edward III Winarno (2016) yang menyatakan bahwa sumber daya memiliki peranan penting didalam implementasi kebijakan. Tidak adanya sumber daya maka kebijakan tersebut hanyalah sebuah dokumen yang berada dikertas.

Walaupun terdapat perintah mengenai implementasi dengan tepat, jelas serta konsisten namun bila didalam pelaksanaannya terdapat kekurangan yaitu pada

suber dayanya maka dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut menjadi tidak dapat berjalan dengan efektif.

c. Sikap pelaksana

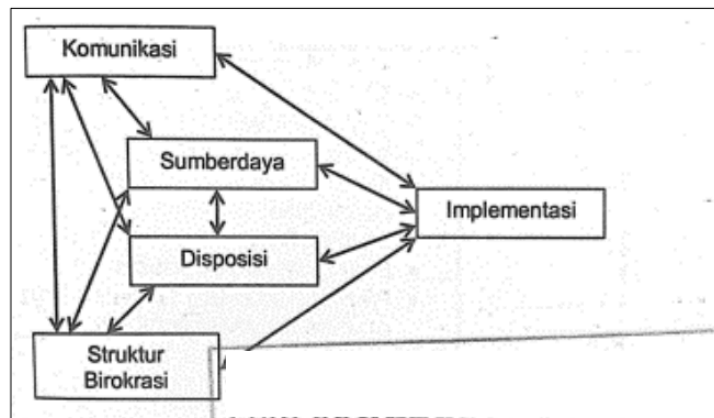
Menurut Edward III (dalam Winarno, 2016) sikap pelaksananya tersebut yaitu sebagai dari sikap pelaksana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut memiliki sikap yang positif dengan seperti adanya sebuah dukungan kepada implementasi kebijakan tersebut sehingga implementasi dari kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan ssesuai. Dalam sikap pelaksana sendiri bila memiliki sikap yang tidak mendukung yaitu menolak dari sebuah kebijakan merupakan sikap yang negatif dalam implementasi kebijakan maka hal tersebut akan menyebabkan sebuah kendala dan mampu menimbulkan sebuah konflik didalam implementasi kebijakan tersebut.

Sikap pelaksana berdasarkan ahli yaitu Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2014) menyatakan bahwa mengenai sikap pelaksana dari sikap menerima maupun sikap menolak dari pelaksana mampu mempengaruhi kepada keberhasilannya maupun kegagalan kepada berjalannya implementasi kebijakan tersebut.

d. Birokrasi.

Implementasi kebijakan berdasarkan birokrasi ini perlunya struktur dari birokrasi yang mampu memberikan dampak kepada efektif sebuah kebijakan sehingga mampu mempermudah keberlangsungan dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan Edwards III dalam Winarno (2016) mengemukakan bahwa dalam birokrasi memiliki karakter utama dalam keberjalanannya implementasi kebijakan

yaitu didalam *SOP Standart Operational Procedure* yang menjadi tuntutan didalam internal mengenai aturan serta dalam keberjalannya organisasi.



Gambar 1.6 Model Implementasi Edward III

Sumber : Buku Perbandingan Administrasi Publik, Indiahono.D, 2009

Sementara Menurut Jan Merse didalam buku "*Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam fakta relitas*" karya Kadji (2015) Implementasi kebijakan yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :

- a. Informasi
- b. Isi dari kebijakan
- c. Dukungan masyarakat baik pada dukungan fisik maupun dukungan nonfisik
- d. Pembagian pada potensi.

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam buku Studi kebijakan Pemerintah karya Herabudin (2022) mendefinisikan implementasi terdapat enam variabel yang harus diperhatikan. Hal tersebut mampu mempengaruhi pada keberhasilan dari implementasi kebijakan :

a. Standard dan sasaran kebijakan yang jelas.

Rincian mengenai standar dari kebijakan yang ingin dicapainya dengan melalui kebijakan serta standarnya untuk mengukur dari pencapaian kebijakan.

b. Sumber daya

Keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dipengaruhi juga pada kemampuan dari sumber daya yang tersedia. Sumber daya sendiri diantaranya seperti pada sumber daya manusia didalam keberhasilan impementasi kebijakan. Selain itu sumber daya sendiri juga berupa dana maupun berbagai dari insentif yang mampu memberikan fasilitas yang efektif dalam pengimplementasian.

c. Komunikasi antarorganisasi dan pengukuhan aktivitas

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan setiap organisasi maupun kelompok memiliki standar maupun tujuan dalam kebijakan, sehingga perlunya komunikasi antar para pelaksana mengenai tujuan maupun standar organisasi. Keberhasilan implementasi juga menuntut pada mekanisme serta prosedur pada kelembagaan yang terstruktur serta lebih tinggi untuk mengontrol sehingga pada implementasi dapat berjalan sesuai dengan standar serta tujuan yang telah ditetapkan (Herabudin, 2022).

d. Karakteristik lembaga/ organisasi pelaksana

Organisasi formal maupun organisasi informal mampu terlibat didalam implementasi kebijakan. Karakteristik dari organisasi pelaksana termasuk pada kompetensi dari agen pelaksana, tingkat hierarkis kontrol dari pelaksana saat pengimplementasian, serta dukungan politik (Herabudin, 2022).

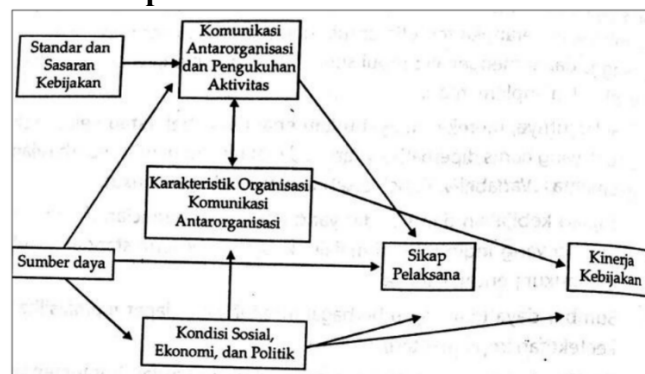
e. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi

Lingkungan eksternal dapat mendorong dari keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pada lingkungan sosial, ekonommi serta politik yang tidak baik ataupun tidak kondusif dapat memberikan masalah dalam kegagalan pada kinerja implemnetasi kebijakan. Sehingga upaya pada implementasi kebijakan dapat bepengaruh dari kondisi lingkungan eksternal.

f. Disposisi/ tanggapan atau sikap para pelaksana

Sikap pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2014) menyatakan menegnai sikap dari pelaksana dan sikap menerima dan menolak dari pelaksana mampu memberikan pengaruh pada keberhasilan maupun pada kegagalan dari berjalannya implementasi kebijakan.

Model Implementasi Van Meter dan Van Horn



Gambar 1.7 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Sumber : Buku Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi
(Herabudin, 2022)

1.5.5 Sampah

Sampah menurut Kuncoro adalah bahan-bahan yang dibuang atau ditinggalkan akibat aktivitas manusia atau alam, yang tidak dapat digunakan lagi karena hilangnya unsur atau fungsi pokoknya. Timbulnya sampah merupakan hasil aktivitas manusia yang berkelanjutan, berapa pun skalanya, dan akan terus ada

selama manusia masih aktif. Namun Anwar berpendapat, aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk proses industri, tidak termasuk dalam kategori limbah biologis karena manusia itu sendiri (kotoran manusia) tidak termasuk dalam kategori limbah tersebut.

Selain definisi konvensional tentang sampah yang umum diterapkan pada sampah, sampah dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang ekonomi, sampah dicirikan sebagai sisa-sisa bahan yang telah mengalami pengolahan, baik karena ekstraksi komponen penting, pengolahan yang ekstensif, atau karena sudah usang. Secara ekonomi, bahan-bahan tersebut tidak memiliki nilai dan dianggap sebagai sumber daya yang terbuang atau terbuang akibat aktivitas manusia atau proses alam.

Dari sudut pandang lingkungan, sampah dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga menimbulkan pencemaran atau gangguan. Menurut terminologi lingkungan hidup, sampah diartikan sebagai bahan-bahan yang kurang bernilai, bahan-bahan yang tidak mempunyai kegunaan praktis, barang-barang produksi yang rusak atau cacat, bahan-bahan berlebih, atau bahan-bahan yang ditolak.

Intinya, sampah mencakup spektrum luas bahan dan zat yang tidak lagi dianggap berguna atau berharga dalam konteks dan perspektif berbeda. Hal ini merupakan tantangan dalam hal pengelolaan, karena akumulasi limbah dapat menimbulkan bahaya lingkungan dan memerlukan strategi pembuangan, daur ulang, atau pemanfaatan kembali yang efektif untuk mengurangi dampaknya.

Mengenali sifat beragam limbah sangat penting untuk mengatasi aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial yang terkait dengan pengelolaan dan pembuangannya.

Terdapat tiga jenis sampah yang diketahui berikut ini :

1. Sampah Organik/Basah

Sampah organik merupakan limbah dari sisa-sisa kegiatan rumah tangga yang mengandung kadar air tinggi dan mudah membusuk. Jenis sampah ini mudah terurai secara alami di dalam tanah karena sifat alaminya, sehingga ramah lingkungan. Hasil penguraiannya mudah diserap oleh tanah dan dapat meningkatkan kesuburannya. Contoh sampah organik meliputi daun-daunan, limbah dapur, sisa makanan, sisa sayuran, serta kulit dan sisa buah-buahan.

2. Sampah Anorganik/Kering

Sampah anorganik merupakan limbah kering hasil aktivitas manusia yang sulit terurai secara alami karena membutuhkan waktu yang lama untuk terdegradasi di dalam tanah. Jenis sampah ini umumnya berasal dari bahan-bahan yang digunakan sehari-hari, seperti kemasan makanan, yang jumlahnya terus meningkat seiring dengan kebiasaan konsumsi makanan sistem bawa pulang (*take away*). Contoh sampah anorganik meliputi plastik, kardus, botol, kertas, logam, besi, karet, dan berbagai bahan kering lainnya.

3. Sampah Berbahaya

Sesuai dengan namanya, jenis sampah ini dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan jika dibuang sembarangan, baik secara sengaja maupun

tidak. Contohnya adalah limbah dari aktivitas medis di rumah sakit dan klinik, yang dapat menimbulkan risiko serius jika tidak dikelola dengan benar.

Selama ini di Indonesia limbah rumah tangga umumnya dikumpulkan dan langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa terlebih dahulu dipilah atau diolah di tempat penampungan sementara (TPS). Di TPA, sisa-sisa sampah tersebut kemudian ditimbun menggunakan metode sanitary landfill. Abu yang dihasilkan dari proses tersebut tidak dibiarkan terbang sia-sia, melainkan dimanfaatkan sebagai bahan campuran untuk pembuatan batako maupun kompos (Modul Pengolahan Sampah, hlm. 89).

Di tingkat lokal, kebijakan pengelolaan bank sampah di Kota Semarang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bank Sampah. Peraturan ini dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA dan meminimalkan dampak negatifnya. Dalam Pasal 24 Perda tersebut—yang membahas tentang penanganan sampah—ditegaskan mekanisme pemrosesan akhir, yaitu bagaimana sampah diolah sebelum atau sesudah dibuang ke TPA Jatibarang, termasuk tata cara penimbunan sanitary landfill dan pemanfaatan residu yang dihasilkan.

1.5.6 Bank Sampah

Bank sampah berfungsi sebagai platform untuk transaksi yang menghasilkan pendapatan dan memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah. Bambang Suwerda mengartikan bank sampah sebagai wadah dimana para penabung sampah dapat melakukan kegiatan pelayanan yang difasilitasi oleh teller

bank sampah. Senada, Sucipto memaparkan bank sampah mengelola sampah perumahan melalui penerapan strategi 3R dengan fokus Reuse, Reduce, dan Recycle. Warga masyarakat menitipkan sampahnya pada lembaga yang telah dibentuk dan disepakati bersama. Penjelasan para ahli tersebut secara kolektif menggarisbawahi bahwa bank sampah berfungsi sebagai sistem pengelolaan sampah terpadu yang tertanam dalam mekanisme perbankan masyarakat.

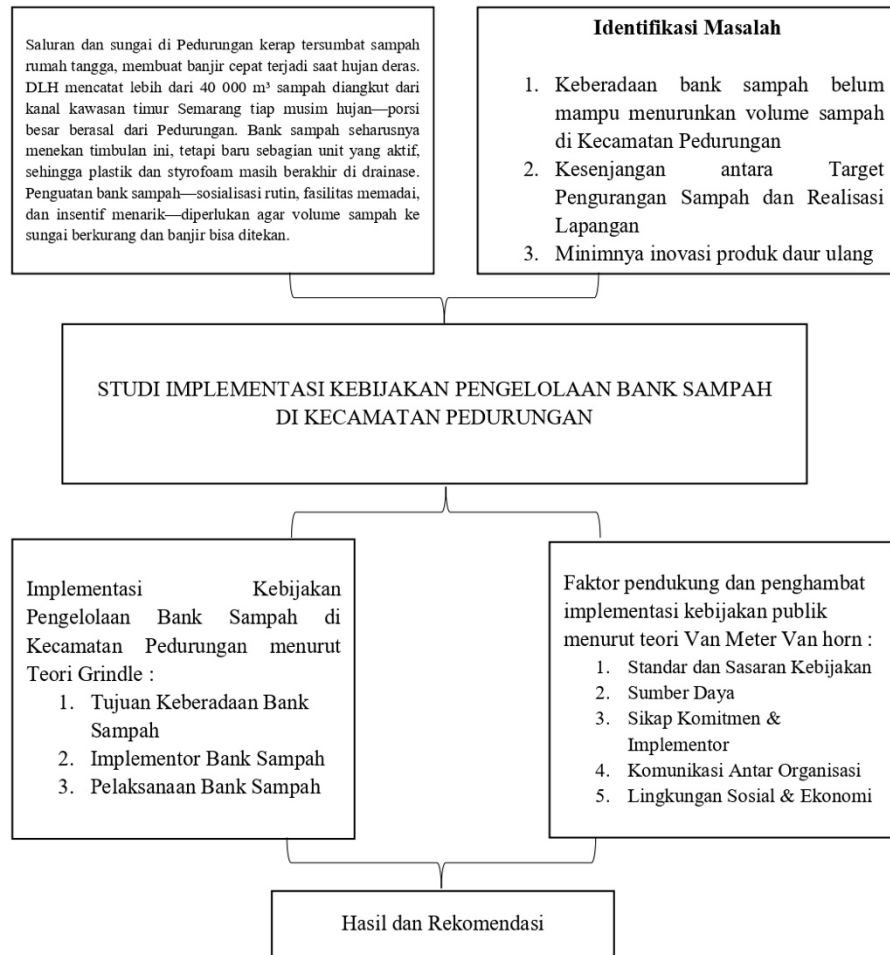
Konsep bank sampah bersifat lugas dan mudah beradaptasi sehingga cocok diterapkan di berbagai wilayah dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini mewakili perubahan transformatif dalam persepsi terhadap sampah, yang selama ini dipandang kotor dan tidak sedap dipandang. Dengan memasukkan istilah “bank” ke dalam namanya, bank sampah memperkenalkan aspek pengelolaan sampah yang bersih dan terorganisir. Konsep inovatif ini menggabungkan gagasan kebersihan yang diasosiasikan bank dengan penanganan sampah, sehingga secara efektif meningkatkan status sampah dari cluster yang tidak teratur menjadi terorganisir dan bersih.

Bank sampah menawarkan beberapa manfaat bagi masyarakat. Mereka berfungsi sebagai platform pendidikan untuk mengajarkan anak-anak tentang nilai menabung, bahkan dalam bentuk sampah. Selain itu, mereka berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan perumahan dengan mengelola sampah secara efisien. Bank sampah sangat efektif dalam mengurangi pencemaran lingkungan, khususnya dalam mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran sampah plastik. Selain itu, mereka menyederhanakan proses pemilahan dan pengelolaan sampah kertas, plastik, dan kaleng/botol sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Terakhir, bank sampah memberikan manfaat kepada pihak ketiga, yang disebut “rosok”, karena mereka menerima bahan sampah yang telah disortir sebelumnya, sehingga menyederhanakan operasi mereka.

Intinya, bank sampah melambangkan solusi kreatif dan praktis terhadap tantangan pengelolaan sampah. Mereka mengubah cara masyarakat memandang dan menangani sampah, tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih bersih dan terorganisir namun juga berkontribusi terhadap inisiatif perlindungan lingkungan dan pendidikan. Konsep bank sampah berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan sampah, daur ulang, dan keberlanjutan secara keseluruhan, menjadikannya tambahan yang berharga dalam strategi pengelolaan sampah di berbagai komunitas.

1.5.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.8 Kerangka Pemikiran

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pelaksanaan kebijakan dianalisis dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bank Sampah. Fokus riset

diarahkan pada implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah dan kontribusinya terhadap pengurangan volume sampah di Kecamatan Pedurungan:

1. Tujuan Keberadaan Bank Sampah

Tujuan diadakannya bank sampah di kecamatan Pedurungan yaitu :

1) Mengurangi volume sampah

Bank sampah membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA dengan cara memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah

2) Meningkatkan kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat

Bank sampah mendorong masyarakat untuk sadar terhadap lingkungan dan aktif terlibat dalam pengelolaan sampah, mulai dari memilah sampah hingga menyetorkannya ke bank sampah.

3) Memberikan manfaat ekonomi

Bank sampah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui penjualan sampah yang dapat didaur ulang.

2. Implementor Bank Sampah

Implementor bank sampah adalah pihak, baik individu maupun lembaga, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah melalui sistem bank sampah. Mereka berperan sebagai pelaksana teknis, penggerak, pengelola, dan pengawas program, yang meliputi instansi pemerintah, perangkat kelurahan, pengurus RT/RW, pengelola bank sampah, komunitas, dan

kelompok masyarakat. Keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan, komitmen, kapasitas teknis, dan kemampuan kolaborasi para implementor. Indikator Implementor Bank Sampah dapat dilihat dari :

1) Keterlibatan aktif

Tingkat keikutsertaan implementor (DLH, kelurahan, RT/RW, komunitas) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan bank sampah.

2) Komitmen pelaksana

Konsistensi dan keseriusan implementor dalam mendukung dan menjalankan program.

3. Pelaksanaan Bank Sampah

Pelaksanaan bank sampah merupakan kegiatan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat yang dilakukan mulai dari pemilahan, pengumpulan, penimbangan, pencatatan, hingga penyaluran hasil penjualan. Proses dimulai dari pemilahan sampah rumah tangga, kemudian sampah anorganik disetorkan ke bank sampah pada jadwal tertentu untuk ditimbang dan dicatat layaknya tabungan. Kegiatan ini melibatkan pengurus bank sampah, perangkat kelurahan, RT/RW, dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pembinaan, sosialisasi, serta penyediaan sarana pendukung. Keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada konsistensi kegiatan, ketersediaan fasilitas, dan kesadaran masyarakat.

1) Mekanisme Pengelolaan

Pelaksanaan bank sampah dilakukan melalui jadwal penimbangan dan penyetoran sampah yang teratur. Proses pemilahan, penimbangan, dan pencatatan hasil dilakukan dengan prosedur yang jelas, disertai sistem tabungan yang mencatat nilai penjualan sampah setiap nasabah.

2) Sarana dan Prasarana

Kegiatan didukung oleh ketersediaan timbangan, wadah penyimpanan, dan alat angkut. Lokasi bank sampah mudah diakses warga serta dijaga kebersihan dan kerapihannya untuk mendukung operasional.

3) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi warga terlihat dari jumlah nasabah aktif yang konsisten memilah dan menyetorkan sampah. Kehadiran warga dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga menunjukkan tingkat keterlibatan yang positif.

4) Monitoring dan Evaluasi

Setiap kegiatan dicatat dalam laporan hasil pengumpulan dan penjualan sampah. Evaluasi rutin dilakukan untuk mengukur capaian program, diikuti tindak lanjut perbaikan agar pelaksanaan semakin efektif.

1.6.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan

Teori dari Van Meter & Van Horn digunakan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat, berikut ini :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

- 1) Tingkat kejelasan sasaran dan tujuan kebijakan
- 2) Konsistensi tujuan

Konsistensi tujuan menjadi faktor penting karena kebijakan harus dijalankan secara berkesinambungan tanpa perubahan yang membingungkan pelaksana. Konsistensi ini dapat dilihat dari keberlanjutan program bank sampah, adanya dukungan regulasi, serta pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.

2. Sumber Daya

- 1) Sumber daya manusia

Keberadaan kader, pengurus bank sampah, serta dukungan dari aparat kelurahan dan DLH menjadi faktor penentu.

- 2) Sumber dana

Ketersediaan dana operasional, baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat, berperan penting untuk menunjang keberlanjutan bank sampah.

- 3) Sarana dan prasarana

Sarana seperti timbangan, tempat penyimpanan sementara, hingga jaringan mitra pengepul menjadi instrumen vital agar bank sampah dapat berjalan efektif.

3. Sikap Komitmen & Implementor

1) Tingkat Keterlibatan

Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan implementor, mulai dari DLH, kelurahan, RT/RW, hingga komunitas lokal. Tingkat keterlibatan dapat dilihat dari keikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

2) Komitmen Pelaksana

Komitmen pelaksana ditunjukkan melalui keseriusan dalam mengawal jalannya kegiatan, menjaga keberlanjutan program, serta mengatasi kendala yang muncul.

4. Komunikasi Antar Organisasi

1) Alur Komunikasi

Alur komunikasi antar pihak pelaksana, baik vertikal (DLH ke kecamatan/kelurahan) maupun horizontal (antar RW/komunitas), menentukan sejauh mana informasi dan instruksi dapat tersampaikan dengan jelas.

5. Lingkungan Sosial, dan Ekonomi

1) Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat menjadi faktor eksternal penting. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat bank sampah akan memengaruhi partisipasi mereka dalam memilah dan menyetorkan sampah.

2) Dukungan Budaya Lokal

Budaya gotong royong dan kebiasaan warga dalam kegiatan bersama dapat mendukung penguatan partisipasi. Jika pengelolaan bank sampah dipandang selaras dengan nilai-nilai lokal, maka keberterimaan program akan lebih tinggi.

3) Manfaat Ekonomi

Manfaat ekonomi dari penjualan sampah anorganik dan insentif yang diperoleh masyarakat menjadi daya tarik utama.

Tabel 1.3 Fenomena Penelitian

	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati
1	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan	Tujuan Keberadaan Bank Sampah	a. Mengurangi volume sampah b. Meningkatkan kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat c. Memberikan manfaat ekonomi
		Implementor Bank Sampah	a. Keterlibatan aktif b. Komitmen Pelaksana
		Pelaksanaan Bank Sampah	a. Mekanisme Pengelolaan b. Sarana dan Prasarana c. Partisipasi Masyarakat d. Monitoring dan Evaluasi

2	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan	Standar dan Sasaran Kebijakan	a. Tingkat kejelasan sasaran dan tujuan kebijakan b. Konsistensi Tujuan
		Sumber Daya	a. Sumber daya manusia b. Sumber dana c. Sarana dan prasarana
		Sikap Komitmen & Implementor	a. Tingkat Keterlibatan b. Komitmen Pelaksana
		Komunikasi Antar Organisasi	a. Alur komunikasi
		Lingkungan Sosial & Ekonomi	a. Kesadaran Masyarakat b. Dukungan Budaya Lokal c. Manfaat Ekonomi

1.7 Argumen Penelitian

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 mewajibkan setiap rumah tangga menerapkan prinsip 3R melalui pemanfaatan fasilitas bank sampah. Namun, data Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 menunjukkan timbulan sampah harian masih mendekati 1.000 ton, dengan sekitar 150 ton berasal dari Kecamatan Pedurungan—wilayah padat penduduk dengan kepadatan lebih dari 9.500 jiwa/km². Sejak 2019, telah terbentuk 30 unit bank sampah di kecamatan ini, namun pelaksanaannya bervariasi. Di RW dengan kader terlatih dan infrastruktur memadai, pengalihan sampah mencapai 15–18 ton per bulan, sedangkan di RW dengan fasilitas terbatas hanya 3–4 ton per bulan. Manfaat ekonomi bank sampah juga terdampak fluktuasi harga material daur ulang, sementara proses pencairan

insentif yang rumit menurunkan motivasi warga. Berdasarkan kerangka konten–konteks Grindle, belum optimalnya implementasi kebijakan di Pedurungan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara desain kebijakan (target, insentif, struktur pelaksana) dan kondisi lapangan, seperti kepadatan, keterbatasan lahan, dan volatilitas pasar. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah dengan mempertimbangkan faktor konten dan konteks secara seimbang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merujuk pada pendekatan / cara dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut yakni metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data penelitian. Tipe penelitian memberika kerangka kerja yang akan membantu penelitian dalam mengarahkan pendekatannya sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini peneliti gunakan untuk memahami secara mendalam konteks dan fenomena yang sedang saya teliti. Dalam metode deskriptif, angka penelitian adalah untuk menggambarkan dengan teliti karakteristik, sifat, atau keadaan dari subjek yang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami perspektif, pandangan, dan pengalaman individu yang terlibat dalam penelitian, memberikan wawasan yang kaya dan

mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang sedang diteliti.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian kualitatif berfokus pada suatu masalah tertentu. Dengan menetapkan fokus tersebut, penelitian dapat dibatasi dan disesuaikan dengan karakteristik informasi yang diperoleh di lapangan, sehingga masalah utama yang menjadi fokus penelitian dapat dianalisis secara mendalam.

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Pedurungan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pedurungan yang berlokasi di Jl. Brigjend S. Sudiarto No. 367, Gemah, Pedurungan, Kota Semarang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya jumlah timbunan sampah di Kecamatan Pedurungan, yang mencapai sekitar 150 ton per hari, serta keberadaan lebih dari 90 unit bank sampah yang tersebar di seluruh kelurahan di wilayah ini. Selain itu, Kecamatan Pedurungan juga merupakan salah satu wilayah yang secara aktif menerapkan program bank sampah berbasis masyarakat, menjadikannya lokasi yang relevan untuk dianalisis dalam konteks implementasi kebijakan lingkungan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek yang ada dalam penelitian ini adalah beberapa narasumber, narasumber adalah orang yang memiliki informasi lebih terkait dengan masalah

yang sedang diteliti, dimana narasumber akan diminta penjelasan terkait dengan informasi yang diinginkan dan memberikan informasi yang mereka miliki. Maka dari itu, narasumber memiliki manfaat bagi peneliti, pasalnya dari hasil informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui narasumber tersebut bisa terjadi proses brainstorming / bertukar pikiran terkait dengan permasalahan yang terjadi. Berikut narasumber utama yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel 1.4 Identifikasi Informan

Informan	Jabatan/Kedudukan
Informan 1	Bidang Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup)
Informan 2	Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup)
Informan 3	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Pedurungan
Informan 4	Ketua Bank Sampah – Kelurahan Gemah
Informan 5	Pelaku Bank Sampah – Kelurahan Gemah
Informan 6	Pengepul Bank Sampah

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam konteks penelitian mengacu pada sifat / atribut unik dari informasi yang dikumpulkan atau digunakan dalam penelitian ilmiah. Data yang berperan menjadi pendukung dalam menjawab pertanyaan penelitian, data tersebut bersifat penting dalam proses ini. Dalam penelitian ini, metode kualitatif menjadi pilihan utama yang digunakan peneliti.

Data kualitatif yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diungkapkan dalam angka, menitikberatkan pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek kontekstual, persepsi, makna, dan interpretasi subjek. Peneliti dalam tahapan ini melakukan pengumpulan berbagai data kualitatif melalui berbagai metode, seperti wawancara, analisis dokumen, & observasi. Data kualitatif ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan kerangka / pendekatan kualitatif tertentu yang telah ditentukan, seperti analisis isi, naratif, atau berdasarkan topik. Pendekatan ini akan menjadi panduan guna mensitesiskan data & mengungkap informasi lebih dalam terkait dengan berbagai isu implementasi kebijakan yang sedang diteliti. Dengan itu, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih luas tentang implementasi kebijakan bank sampah, termasuk berbagai perspektif, hambatan, dan dampaknya terhadap masyarakat yang merasakan efek dari pemakaian bank sampah yang ada. Data kualitatif ini memungkinkan peneliti menjawab pertanyaan penelitian dalam konteks ini.

1.8.5 Sumber Data

Data pastinya diperlukan dalam suatu penelitian, pada hal ini, data yang didapatkan dalam proses penelitian ialah data Primer & Sekunder, dimana pada perolehan hal tersebut juga terdapat sumber, berikut penjelesannya terkait dengan sumber yang ada :

- Data Primer

Data primer ini ialah sebuah data yang diperoleh melewati narasumber yang ada baik individu maupun kelompok, data primer pada penelitian ini didapatkan lewat

proses interview yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Selatan, Ketua dan Staff Badan Pengelolaan Sampah Kota Semarang dan Warga Kecamatan Pedurungan.

- Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya Hasan (2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, seperti dari bahan literatur, penelitian sebelumnya, buku, dan sumber lainnya.

- **Data BPS Kota Semarang**
- **Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional**
- **Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**
- **Perda Kota Semarang No. 6/2012**
- **Perwali No. 4/2023 (Rencana Induk)**
- **RPJMD Kota Semarang 2021 – 2026**
- **Kabar Harian**
- **Jurnal Penelitian Sebelumnya**

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara & dokumen, metode wawancara yang dipakai ialah wawancara yang terstruktur, dokumentasi, serta observasi. Guna mendapatkan data tersebut, peneliti dalam penelitian ini melaksanakan penghimpunan data dengan terjun langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yang bertujuan guna melakukan proses penghimpunan data & menghimpun teori yang berkaitan dengan berbagai sumber

yang ada. Selain wawancara, dalam proses penghimpunan data juga memakai dokumen, ini diterapkan menggunakan cara menghimpun data dari referensi yang didapatkan dari buku & sebagainya. Berikut penjelasan angka-teknik yang digunakan dalam menghimpun data pada penelitian ini, diantaranya :

1. Wawancara (interview)

Teknik wawancara ialah angka yang dilakukan guna menghimpun informasi dari individu / kelompok, dimana individu tersebut dikenal dengan nama narasumber. Interview dilakukan dengan 2 pihak, yakni peneliti selaku interview & narasumber selaku interviewer. Dimana dalam hal penelitian ini ada beberapa narasumber yang hadir dalam penelitian ini, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Staff Khusus Badan Pengelolaan Sampah Kota Semarang, dan Warga Kecamatan Pedurungan.

2. Observasi

Observasi / pengamatan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan struktur yang baik & sudah terencana sebelumnya terkait dengan peristiwa sosial. Observasi, biasanya memiliki tujuan guna membaca terkait dengan konteks penelitian ini, apakah sudah efektif / belum. Observasi dilakukan pada saat peneliti hadir di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, untuk mempelajari dan mendokumentasikan berbagai faktor yang relevan dengan pengelolaan bank sampah guna mengungkapkan berbagai informasi yang terjadi di lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik yang terakhir ialah sebagai barang bukti dalam suatu peristiwa yang sudah dirasakan sebelumnya. Dokumen tersebut bisa diartikan dalam bentuk gambar,

tulisan, & lain-lain. Teknik ini dapat menjelaskan & dijadikan sebagai barang bukti, karena didalamnya terdapat gambar & rekaman suara. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan termasuk catatan, laporan yang disediakan oleh informan yang relevan dengan data yang diperlukan, peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian, dan juga data yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup di Kota Semarang yang mungkin bisa diperoleh selama proses penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Sebelum peneliti melakukan terjun ke lapangan, selama berada di tempat penelitian, dan sampai kemudian menyampaikan hasil dari penelitian temuannya, analisis data dapat dilakukan dalam pendekatan penelitian kualitatif. Berikut beberapa cara guna menganalisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Sugiyono (2016):321-330), yakni :

- Pengurangan Data (Reduksi Data)

Pada hakikatnya melibatkan kegiatan merangkum, menyoroti elemen- elemen utama, dengan signifikan, serta mengidentifikasi pola maupun tema yang muncul. Melalui proses ini, dapat dilakukan penyaringan informasi relevan dalam penelitian untuk mempermudah data yang dikumpulkan setelahnya apabila diperlukan.

- Data Display (Penyajian Data)

Lalu langkah yang kedua adalah menyajikan data / data display, Data yang disajikan melalui kualitatif penelitian bisa berbentuk narasi singkat, grafik, relasi antara kategori, diagram alir, atau format lainnya. Guna memudahkan pemahaman

tentang konteks sebenarnya dan merencanakan setelahnya berdasar pemahaman yang diperoleh.

- **Penarikan Kesimpulan**

Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Melalui kualitatif penelitian, kesimpulan yang ditarik seringkali menghasilkan temuan-temuan yang baru dan penelitian yang sebelumnya tidak pernah ada. Deskripsi yang lebih jelas tentang objek penelitian, hubungan kausal atau interaksi yang ditemukan, pembentukan hipotesis baru, atau pengembangan teori merupakan temuan-temuan dari penelitian ini.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian sangat penting untuk memastikan keandalan dan validitas temuan. Uji kualitas data akan dilakukan untuk melihat dan membuktikan bagaimana keabsahan dalam penelitian ini agar dapat benar-benar disebut sebagai penelitian ilmiah, serta sekaligus untuk menguji berbagai data yang didapatkan. Pengecekan data pada kualitas data pada dasarnya berguna dalam menyangkal berbagai tuduhan yang masuk kepada penelitian kualitatif yang juga menyatakan ketidak-ilmiahannya penelitian, juga dapat sebagai adanya unsur yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Berikut terdapat beberapa aspek penting dalam kualitas data, yakni :

1. **Akredibilitas** : Mengacu pada sejauh mana jumlah data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan akurat. Dalam suatu penelitian ini, akredibilitas data dapat dipertanyakan jika proses pengumpulan data tidak

dilakukan secara hati-hati. Misalnya, jika wawancara dengan responden tidak dilakukan dengan pertanyaan yang jelas atau jika data yang diperoleh dari sumber tertulis tidak valid, maka akredibilitas penelitian ini dapat terpengaruh.

2. Konfirmabilitas : berkaitan dengan sejauh mana temuan dan analisis data dapat dikonfirmasi oleh pihak lain yang melakukan penelitian serupa. Dalam penelitian ini, penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah penelitian, analisis data, dan temuan dapat direproduksi atau dikonfirmasi oleh peneliti lain yang ingin mengulangi penelitian serupa di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan dan menyediakan dokumentasi yang baik.

3. Otentitas: Mencerminkan apakah data yang dikumpulkan mencerminkan realitas yang ada di lapangan dan dapat dianggap sebagai representasi yang sah. Dalam penelitian ini, otentitas terkait dengan sejauh mana data yang diperoleh mencerminkan pelaksanaan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Pedurungan dengan sebenar-benarnya. Untuk memastikan otentitas, penting untuk memverifikasi data dengan sumber-sumber yang sah, seperti dokumen resmi atau sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang dalam tentang pelaksanaan pengelolaan bank sampah tersebut.